



Jurnal Arsitektur Zonasi

Journal homepage:
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jaz>



Analisis Kelengkapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Eksisting di Perumahan Kedinasan Pussenarhanud Cimahi

Patria Salsabila Kirana Devi ^{*1}, Shabrina Salsabila ², Balebat Giwangkara ³, Raya Aulia ⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

*Correspondence: E-mail: patriasalsabila@upi.edu

ABSTRACT

Pussenarhanud is one of the military-based complexes in Cimahi. Cimahi city itself is known as a military city because in this city there are many educational centers for soldiers. One of them is Pussenarhanud, which is the central implementing agency for the Indonesian Army which is located directly under Kasad in the field of developing Air Defence Artillery weapons (Arhanud). The Pussenarhanud housing complex itself is facilitated for the TNI who serve at Pussenarhanud. With a small number of houses, namely only accommodating 145 families, this housing is divided into 2 RW areas, that is RW 17 and 18. The type of house in this housing is Landed House, which on average has facilities consisting of a living room, a bathroom, and 2 bedrooms. Based on data from the Ministry of Public Works which we used as a reference regarding standards, we made a comparison of the facilities and infrastructure and supporting facilities that must be in the TNI official residence area with the existing facilities in the Pussenarhanud Cimahi housing complex. This research involves direct observation at the location and also conducting interviews with several samples of residents. After making observations, the results we got were that the infrastructure and other supporting facilities in the Pussenarhanud housing complex were quite complete and in accordance with existing standards. But perhaps what is lacking and can be improved is the availability of sidewalks and a clearer area division boundary to make it easier for people who visit there.

ABSTRAK

Pussenarhanud merupakan salah satu kompleks berbasis militer yang ada di Kota Cimahi. Kota Cimahi sendiri dikenal sebagai kota tentara karena di kota ini terdapat banyak pusat pendidikan

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 2 July 2024

First Revised 15 August 2024

Accepted 20 September 2024

First Available online 1 Oct 2024

Publication Date 1 Oct 2024

Keyword:

state official residence;
military;
facilities and infrastructure

Kata Kunci:

rumah dinas;
TNI;
sarana prasarana

untuk tentara. Salah satunya Pussenarhanud ini yang merupakan badan pelaksana pusat TNI Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Kasad di bidang pembinaan kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud). Untuk kompleks perumahan Pussenarhanud ini sendiri difasilitasi untuk TNI yang bertugas di Pussenarhanud. Dengan jumlah rumah yang tidak terlalu banyak yaitu hanya menampung sebanyak 145 kepala keluarga, perumahan ini dibagi menjadi 2 wilayah RW yaitu RW 17 dan 18. Jenis rumah pada perumahan ini adalah Landed House, yang rata-rata memiliki fasilitas yang terdiri dari ruang tamu, kamar mandi, dan 2 kamar tidur. Berdasarkan data dari kementerian PU yang kami jadikan acuan terkait standar, kami melakukan komparasi atas fasilitas sarana dan prasarana dan penunjang yang harus ada dalam kawasan rumah dinas TNI dengan fasilitas eksisting yang ada di perumahan Pussenarhanud Cimahi. Penelitian ini dengan cara observasi langsung ke lokasi dan juga melakukan wawancara terhadap beberapa sampel dari penghuni. Setelah melakukan observasi, hasil yang kami dapatkan adalah fasilitas sarana prasarana dan penunjang lain yang ada di perumahan Pussenarhanud ini sudah cukup lengkap dan sesuai dengan standar yang ada. Hanya saja mungkin hal yang masih belum dapat dipenuhi adalah ketersediaan trotoar dan pembatas pembagian daerah yang lebih jelas untuk memudahkan orang yang berkunjung.

Copyright © 2024 Universitas Pendidikan Indonesia

1. PENDAHULUAN

Rumah merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai hunian atau tempat tinggal dan juga sarana pembinaan keluarga (Undang-Undang No.4 Tahun 1992). Dalam arti luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan, melainkan juga merupakan tempat kediaman yang ketika dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat, telah memenuhi syarat kehidupan yang layak, (Frick et al., dalam Ningrum, 2018). Rumah merupakan bangunan layak huni yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan juga dapat menjadi aset bagi pemiliknya (Hidayati & Ratih Sari, 2021).

Tentunya hunian ini memiliki kebutuhannya masing-masing berdasarkan penghuninya, misalnya kebutuhan hunian untuk berapa orang, memiliki lokasi yang strategis, dekat dengan lokasi tempat bekerja, dsb. Contohnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti TNI dan Polri tentunya untuk mengefektifkan waktu akan memerlukan hunian yang dekat dengan tempat bertugasnya, maka difasilitasi oleh negara dalam bentuk rumah dinas.

Berdasarkan peraturan walikota Bandung nomor: 1384 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Pertamanan Bandung, pasal 2; Dinas adalah unsur pelaksana dari urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan pertamanan.

Pembangunan perumahan rumah dinas untuk anggota, khususnya anggota Angkatan Laut, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas mereka. Rumah dinas ini memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman, sehingga para anggota dapat fokus menjalankan tugas (Dyan Agustin, 2024).

Rumah dinas atau rumah negara, sebagai fasilitas yang disediakan oleh negara, berfungsi sebagai tempat tinggal bagi pejabat atau pegawai negeri dan serta sebagai sarana pembinaan keluarga dan penunjang dalam pelaksanaan tugas mereka (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005). Dalam kenyataannya, rumah dinas sering menjadi masalah karena perselisihan mengenai hak penghuni setelah pensiun. Banyak keluarga veteran TNI masih tinggal di rumah dinas mereka selama bertahun-tahun tanpa hak resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumah dinas dimiliki dan digunakan, serta bagaimana negara harus menghargai jasa purnawirawan TNI.

Para pejabat militer atau pegawai negeri difasilitasi oleh negara sebuah rumah dinas agar terjamin keefektifan waktunya dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Khusus bagi pejabat militer (TNI) untuk memiliki tanah absentee, karena seringkali kesulitan dalam menentukan domisili, penyebabnya adalah pemindahan tugas yang jauh dari alamat asalnya. Purnawirawan pejabat militer diberikan pengecualian dalam memiliki tanah absentee.

Absentee merupakan ketentuan dalam penghapusan hak penguasaan atas tanah pertanian, rata-rata tanah ini berada di wilayah pedesaan sedangkan pemilik tanah itu sendiri memiliki tempat tinggal yang jauh dari desa tersebut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Rumah dinas dapat dihuni hanya ketika menjabat atau menjalankan tugas kedinasan. Namun saat ini, keluarga Purnawirawan TNI banyak yang tanpa memiliki hak menghuni rumah negara dengan alasan bahwa rumah ini menjadi hak milik mereka karena mereka telah menempatnya selama bertahun-tahun, mereka merasa bahwa negara harus memberikan apresiasi kepada Purnawirawan yang telah memberikan banyak jasa dalam membela & menjalankan tugas untuk kepentingan negara. Contoh pelanggaran yang terjadi, yaitu banyak dari rumah dinas atau Rumah Negara tersebut sudah disalahgunakan, karena tidak sedikit rumah-rumah tersebut sudah disewakan atau bahkan diperjualbelikan. (Maurizka

& Rahmadhani, 2019). Sesuai dengan Surat Keputusan Kasad No. Skep 89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973, bahwa Rumah Dinas adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun Rumah dikembalikan kepada negara. (Priandy B. Purnawan et al., 2023)

Memang untuk pegawai negeri sipil atau militer memiliki hak untuk menempati rumah dinas dari negara dikarenakan efektivitas waktu untuk mengerjakan pekerjaannya. Tetapi ada pengecualian untuk kepemilikan tanah bagi Purnawirawan karena tentunya setelah ada pegawai atau anggota yang pensiun, pasti akan ada penggantinya sehingga tidak mungkin Purnawirawan tersebut masih tetap diberi jatah tempat tinggal di lingkungan perumahan kedinasan (Maurizka & Rahmadhani, 2019). Sehingga setelah habis masa dinas atau jabatannya, purnawirawan tersebut harus keluar dari rumah dinas yang ditempatinya.

Rumah dinas sendiri memiliki kebutuhan penunjang untuk memastikan bukan hanya keefektifan tetapi kesejahteraan penghuninya. Karena rumah sendiri bukan hanya konsep bangunan fisik saja, tetapi rumah merupakan tempat tinggal yang dapat berupa suatu lingkungan yang tentunya perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang aktivitas penghuninya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Sarana merupakan fasilitas yang tersedia dalam Lingkungan Hunian dan berfungsi sebagai pendukung penyelenggaraan juga pengembangan dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sedangkan Prasarana merupakan kelengkapan dasar dari fisik Lingkungan Hunian sebagai kebutuhan dalam bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman, yang telah memenuhi standar tertentu. Untuk memastikan keberlangsungan kehidupan yang ada di suatu wilayah atau lingkungan permukiman, prasarana dan sarana merupakan bangunan dasar yang sangat penting (Reflando J. Rumagit et al., 2021)

Menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil), prasarana dan sarana merupakan elemen dasar yang sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia dalam lingkungan yang terbatas. Prasarana dan sarana ini dirancang untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan memfasilitasi mobilitas yang mudah dalam berbagai kondisi cuaca, sehingga memungkinkan manusia untuk hidup dengan sehat dan berinteraksi dengan baik satu sama lain (Fanly A Rotinsulu et al., 2017)

Sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perumahan dan permukiman, prasarana mencakup kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021). Beberapa jenis sarana dan prasarana yang harus ada di dalam perumahan, yaitu penyediaan air minum dan air bersih, jaringan listrik, jalan penghubung dalam kondisi baik, tempat pembuangan sampah, dsb (Karlina et al., 2021). Jumlah penduduk yang dilayani dan jumlah sarana prasarana yang tersedia dapat menentukan kebutuhan sarana prasarana di suatu daerah (Roswita Dharmasanti, Su Ritohardoyo, 2016)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi oleh pengembang perumahan bersangkutan untuk menghasilkan hunian yang layak huni (Sutanto et al., 2021). Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan, bahkan kesehatan dan kesejahteraan penghuninya (Sutoyo et

al., 2019). Maka dari itu, ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai komponen apa saja yang harus dipenuhi dari suatu kawasan. Salah satunya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 34, sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen Sarana dan Prasarana Kawasan

No	Komponen	Kws Skala Besar	Kawasan Khusus
I	Prasarana		
1	Jalan	Jalan lokal sekunder	Jalan lokal sekunder, jalan di atasair
2	Drainase	Primer dan sekunder	Primer dan sekunder
3	Air limbah	Terpusat, setempat	Terpusat, setempat
4	Persampahan	Tempat pengolahan sementara/ akhir, Komposter.	Komposter, tempat pengolahan sementara
5	Jaringan air minum	Distribusi	Distribusi, terminal air, HU
II	Sarana		
1	Tempat pendidikan,	TK, SD, SLTP, dan SMU	SD, SLTP
2	Layanan kesehatan	Klinik, puskesmas, RS C, B, dan A	Klinik, posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas.
3	Layanan perdagangan	Warung, restoran, pujasera, pasar tradisional, minimarket, pertokoan.	Warung pujasera, pasar, tempat pelelangan ikan
4	Fasos dan fasum	Rumah ibadah, balai pertemuan, kantor.	Rumah ibadah, balai pertemuan.
5	Tempat olahraga	Gedung, lapangan olahraga	Lapangan olahraga
6	Pemukaman	Pemukaman	-
7	Ruang terbuka Hijau	Taman	Taman, tempat penjemuran ikan
8	Terminal	Halte	Dermaga

Sumber: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 34/PERMEN/M/2006

Merujuk dari tabel diatas, ada beberapa sarana dan prasarana yang wajib ada dalam suatu kawasan, baik kawasan skala besar maupun secara khusus untuk selanjutnya dapat dikategorikan apakah sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Sehingga ada urgensi untuk menganalisis kelengkapan sarana dan prasarana yang ada pada perumahan-perumahan di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan saran evaluasi apabila masih terdapat hal yang kedepannya dapat diperbaiki.

Sebelumnya, terdapat studi kasus berdasarkan penelitian, yaitu: Mengutip dari Pipiet Gayatri Sukarno pada Karakter Spasial Bangunan Kolonial Rumah Dinas Bakorwil Kota Madiun. Pembahasan pada penelitian ini adalah kondisi karakter spasial yang berkaitan dengan ruang di dalamnya yaitu pembahasan mengenai aspek-aspek pola ruang, alur sirkulasi, orientasi ruang, dan orientasi bangunan Kolonial Rumah Dinas Bakorwil Kota Madiun yang bisa memberikan dampak baik terhadap pengguna nya. Kajian tersebut memberikan sedikit gambaran mengenai fasilitas eksisting dalam bangunan perumahan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dyan Agustin pada Tata Ruang Rumah Dinas TNI AL Berdasarkan Privasi Penghuninya (Studi kasus Perumahan Dinas Kompleks TNI AL Gedangan Sidoarjo), Menunjukkan tata ruangrumah tinggalnya berhubungan dengan privasi, penggolongan status / pangkat, dan keadaan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi sarana dan prasarana di Komplek Pussenarhanud Cimahi, sebuah kawasan perumahan dinas yang dikelola oleh TNI AD. Dengan melakukan observasi langsung dan wawancara dengan penghuni, penelitian ini berusaha untuk mengetahui kualitas, ketersediaan, dan bagaimana fasilitas tersebut memenuhi kebutuhan penghuninya. Studi ini mencakup analisis aspek lingkungan fisik, sosial, dan budaya kompleks, serta fasilitas umum dan sosial yang tersedia di sana. Sebagai rujukan, penelitian ini mengambil dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan rumah dinas serta fasilitas yang harus ada di dalam kawasan

perumahan. Harapannya agar dapat memberikan saran yang tentang bagaimana meningkatkan kualitas perumahan dinas berdasarkan fasilitasnya dan kesejahteraan penghuninya berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif, yaitu dengan melakukan kajian literatur, lalu melakukan observasi langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Kemudian melakukan wawancara kepada beberapa penghuni kompleks Pussenarhanud untuk mengetahui pendapat mereka terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Lingkungan

3.1.1 Analisis Tipe – Morfologi Lingkungan Pussenarhanud Cimahi

Perumahan dan Permukiman yang kami analisis adalah kompleks Pussenarhud, yaitu Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara. Kondisi disana sangatlah tertata, yaitu menggunakan sistem grid dalam menata kawasan perumahannya. Walaupun kompleks perumahan ini merupakan kawasan tempat tinggal militer, namun orang-orang bebas berlalu lalang di kawasan ini. Para pedagang pun bebas berjualan di tempat ini, karena di kompleks ini terdapat lapangan besar, yang digunakan untuk umum seperti jogging dan juga bermain sepak bola.

- Peta Kota, Wilayah dan Lokasi

Alamat: Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat 40524, Indonesia.



Gambar 1. Peta Jawa Barat
(Sumber: Google Maps, 2024)



Gambar 2. Peta Kota Cimahi
(Sumber: Google Maps, 2024)



Gambar 3. Peta Kecamatan Cimahi Tengah
(Sumber: Google Maps, 2024)



Gambar 4. Peta Kelurahan Setiamanah
(Sumber: Google Maps, 2024)

- Data Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga

Berdasarkan data dari opendata.cimahi.go.id, jumlah penduduk di kelurahan setiamanah terhitung hingga tahun 2023 adalah sebanyak:

- a. Laki-laki = 11. 924 jiwa
- b. Perempuan = 11. 998 jiwa
- c. Jumlah Kepala Keluarga (Kec. cimahi tengah) = 54. 402 jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga (RW 17) = 145 jiwa

- Tapak: Batas, Ukuran dan Luas



Gambar 5. Batas Perumahan Puspenarhanud
(Sumber: Google Maps, 2024)

Keliling: 2.518,7 m

Luas: 239.221,92 m²

- Bentuk, Jenis dan Tipe Rumah/Unit Hunian

Ada beberapa jenis unit rumah di Komplek Puspenarhanud ini, beberapa dari rumah-rumah tersebut diklasifikasikan dengan pangkat atau jabatan dari anggota yang menempatinnya. Secara umum ada tipe 36, tipe 54, dan tipe 36 tetapi 2 lantai.



Gambar 6. Tipe Rumah Perumahan Puspenarhanud
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

3.1.2 Analisis Manusia dan Budaya Serta Proses Perkembangan di dalam Lingkungan Puspenarhanud Cimahi

Puspenarhanud ini mempunyai latar belakang Tentara Negara Indonesia, Komplek rumah dinas TNI sering kali menciptakan lingkungan sosial yang erat, di mana keluarga anggota TNI dapat saling mengenal dan berinteraksi secara akrab. Pada lingkungan Rumah Dinas Selalu diadakan peringatan syukuran Hari Ulang Tahun Arhanud.

Proses perkembangan perumahan dinas Puspenarhanud, yaitu sebelum menjadi perumahan dinas Kawasan ini mempunyai latar belakang dibangunnya Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara Pembentukan pertama markas Artileri pada tanggal 4 Desember 1945 dan pada tahun 1950 kawasan ini menjadi lembaga pendidikan bagi korps artileri.

3.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kawasan lingkungan sendiri cukup bisa dibilang tidak terlalu ramai, tidak banyak pengunjung dari luar selain yang memiliki kepentingan disana misalnya olahraga di lapangan arhanud. Dari faktor keterjangkauan, komplek ini memiliki akses ke fasilitas umum dan sosial yang dekat sehingga kebutuhan penghuninya dapat mudah dipenuhi. Lalu dari faktor keamanan tentu karena merupakan komplek militer pastinya lebih terjaga keamanannya,

dan dilengkapi dengan pos kamling untuk penjagaan. Untuk faktor kenyamanan baik dari sarana dan prasarana serta lingkungannya sendiri sudah terpenuhi dengan cukup baik dan lingkungannya juga tertata sesuai dengan ketentuan dari perumahan dinas negara. Untuk penggunaan rumah dinas sebagai tempat usaha juga diperbolehkan disini. Tetapi tentunya dengan seizin dari pihak Arhanud karena apabila melanggar dapat termasuk sanksi administrasi berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2004, yaitu tentang Perbendaharaan Negara (Indriani et al., 2019).

3.2.1 Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah berbagai infrastruktur yang disediakan untuk kepentingan masyarakat umum, sarana-sarana ini memudahkan kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk menjaga dan merawatnya dengan baik (Ramdhany, 2019). Fasilitas umum juga termasuk dalam social overhead capital, yang memiliki hubungan erat dengan tingkat perkembangan suatu wilayah, perkembangan ini sering ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini terlihat jelas dari fakta bahwa wilayah dengan infrastruktur yang lebih lengkap biasanya menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang infrastrukturnya kurang memadai (Fajar, 2020). Adapun Fasilitas umum antara lain:

1. Jalan: jalan utama untuk masuk ke kompleks ini dapat diakses dari beberapa jalan tetapi yang paling besar adalah akses masuk dari Jl. Sriwijaya Raya. Untuk jalan penghubung rumah-rumah cenderung kecil dan sepi



Gambar 7. Jalan Perumahan Puspenarhanud
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

2. Saluran air: Saluran air yang terdapat di daerah kompleks ini merupakan saluran air sistem terbuka



Gambar 8. Saluran Air Perumahan Puspenarhanud
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

3. Jaringan Listrik: masih menggunakan jaringan listrik yang terletak melintang diatas rumah sehingga agak mengganggu pemandangan.



Gambar 9. Jaringan Listrik Perumahan Pussenarhanud
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

4. Trotoar: untuk di jalan besar kompleks sendiri terdapat trotoar, tetapi di jalan-jalan kecil penghubung rumah-rumah tidak spesifik ada trotoar tetapi ada sedikit bahu jalan yang biasa digunakan untuk pejalan kaki.



Gambar 10. Jalan Kecil Perumahan Pussenarhanud
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

5. TPS sampah: TPA Sampah Baros.



Gambar 11. TPA Sampah Baros
(Sumber: Google Maps, 2023)

6. Penerangan jalan dan umum: ada beberapa lampu jalan yang memadai ada di kompleks pussenarhanud ini sehingga tidak terlalu gelap apabila diakses saat malam hari.



Gambar 12. Penerangan Jalan Perumahan Pussenarhanud
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

3.2.2 Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial adalah sarana yang diperlukan oleh masyarakat dalam lingkungan

pemukiman (putro et al., 2014). Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 mengenai pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah menjelaskan bahwa fasilitas sosial adalah sarana pendukung yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan juga budaya (Rumengan et al., 2019). Fasilitas sosial ini dapat diartikan sebagai layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kepuasan mental, sosial, juga spiritual (Rumengan et al., 2019). Adapun Fasilitas sosial antara lain:

1. Masjid: Masjid yang ada di kompleks perumahan ini adalah Masjid An-Nur Asrama Armed-Arhanud dan Masjid Al-Kautsar. Namun, jarak perumahan ini sendiri pun tidak jauh dari Masjid Agung Kota Cimahi.



Gambar 13. Masjid An-Nur
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 14. Masjid Al-Kautsar
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

2. Lapangan: Terdapat lapangan yang paling sering digunakan bahkan untuk siswa-siswi yang bersekolah di daerah ini adalah Lapangan Arhanud.



Gambar 15. Lapangan Perumahan Pussenarhanud
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

3. Kesehatan: Untuk tunjangan fasilitas kesehatan ada rumah sakit terdekat yaitu RS Dustira. Lalu untuk kesehatan gigi terdekat dari Pussenarhanud sendiri ada Klinik Dokter Gigi Drg. Melinda, apotek obat-in dengan praktek beberapa dokter umum dan spesialis, serta apotek contong dengan praktek dokter umum, lalu ada Klinik Cimahi sehat yang juga memiliki dokter spesialis kandungan.



Gambar 16. Rumah Sakit Dustira
(Sumber: Google Maps, 2021)

4. Pos Kamling: Pos kamling RW 17 sriwijaya baru



Gambar 17. Pos Kamling RW 17
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

5. Sekolah: Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Maahyrah, SDN Setiamanah Mandiri 1, SMP Negeri 3 Cimahi, SMA Negeri 2 Cimahi.



Gambar 18. SMP Negeri 3 Cimahi & SMA Negeri 2 Cimahi
(Sumber: Google Maps, 2018)

6. Fasilitas penginapan: Wisma Transit Pussenarmed, Apartemen Pussen Arhanud



Gambar 19. Wisma Transit Pussenarmed
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

7. Fasilitas olahraga: Pussenarhanud Sport Center, Kartika Shooting Club



Gambar 20. Pussenarhanud Sport Center
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 21. Kartika Shooting Club
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

8. Pasar: Pasar Antri



Gambar 22. Pasar Antri
(Sumber: Google Maps, 2022)

9. Minimarket: Alfamart, Indomaret



Gambar 23. Alfamart & Indomaret
(Sumber: Google Maps, 2023)

10. Pusat perbelanjaan: Cimahi Mall, Venus Cimahi, Buana Toserba



Gambar 24. Cimahi Mall, Venus Cimahi, Buana Toserba
(Sumber: Google Maps, 2021)

3.2.3 Main Entrance

Untuk Main Entrance dari Pusennarhanud sendiri dapat diakses dari Jl. Sriwijaya Raya.



Gambar 25. Jalan Masuk Utama Perumahan Pussenarhanud
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan observasi yang kami lakukan, Komplek Perumahan Pussenarhanud sampaisaat ini masih diperuntukan dan digunakan oleh Prajurit Arhanud TNI AD dan secara keseluruhan bentuk dan regulasi bangunan masih mempertahankan bentuk asli bangunan sesuai dengan saat awal dibangun. Untuk tipe rumah ada beberapa tipe yang dikategorikan berdasarkan jabatan dari anggota TNI AD yang menempatinnya.

Untuk regulasi penempatan rumah-rumah yang ada disini tidak menentu, karena nantinya anggota ada yang pensiun atau kemungkinan dipindah tugaskan, maka anggota tersebut harus keluar dari rumah dinasnya karena memang rumah-rumah yang ada di kompleks ini hanya ditujukan untuk anggota aktif yang berdomisili kerja di Pussenarhanud. Lalu, kesimpulan yang kami dapat adalah:

Berdasarkan sarana dan prasarana umum:

- Jalan utama dan main entrance dari kompleks ini dalam kondisi yang bagus serta tergolong mudah untuk ditemukan dan diakses.
- Sistem saluran air yang ada pada bagian dalam kompleks sudah cukup baik dengan menggunakan saluran air terbuka. Tidak ada kendala seperti banjir karena dibagian

depan kompleks terdapat sungai kecil atau saluran pembuangan air yang dapat mencegah meluapnya air.

- Jaringan listrik atau elektrik dan wifi sudah disediakan dari pihak pengelola, tetapi tetap diperbolehkan untuk memasang tambahan kabel internet sendiri apabila diperlukan.
- Trotoar sendiri belum ada dan sebaiknya disediakan pada jalan besar kompleks. Untuk saat ini, pejalan kaki diharuskan berjalan di bahu jalan.
- TPS sampah terdekat juga sudah ada yaitu di area pasar antri, tetapi karena jaraknya dekat dengan kawasan perumahan sehingga cukup menimbulkan bau tidak sedap.
- Penerangan jalan berupa lampu jalan juga sudah mencukupi dan semuanya berada dalam kondisi yang baik.

Dan berdasarkan sarana prasarana sosial yang tersedia:

- Fasilitas beribadah mayoritas berupa masjid atau mushola sudah tersedia di dalam kompleks ini sendiri sehingga jarak tempuhnya bisa dibilang dekat. Terdapat juga fasilitas beribadah lain seperti pura dan gereja yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari wilayah kompleks.
- Fasilitas kesehatan yang ada di wilayah perumahan tersedia klinik kesehatan umum, gigi dan bidan. Terdapat juga RS Dustira yang jaraknya tidak terlalu jauh.
- Fasilitas pendidikan yang ada juga cukup lengkap dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA. Bahkan jarak ke perguruan tinggi terdekat juga dapat diakses kurang dari 20 menit.
- Fasilitas berbelanja yang banyak dituju oleh masyarakat di daerah ini tentu adalah Pasar Antri dan Cimahi Mall, tetapi selain itu di Jl. Gandawijaya juga banyak toko-toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari.
- Fasilitas olahraga seperti lapangan olahraga dan GYM juga sudah tersedia di dalam area kompleks.

Sebagai rekomendasi mungkin dapat dibuat trotoar terutama pada jalan besar kompleks dan petunjuk daerah yang jelas karena kompleks Pussenarhau ini sendiri terbagi menjadi 2 wilayah RW serta letaknya yang juga berdekatan dengan KPAD Sriwijaya, yang dapat membingungkan apabila tidak mengetahui daerah tersebut.

REFERENSI

- Budi Purnawan, P. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN RUMAH DINAS TNI AD PADA KODAM II/SRIWIJAYA DI PALEMBANG (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Fajar, M. A. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1).
- Hidayati, E., & Ratih Sari, S. (2021). KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN GRIYAHARAPANWELER. *LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR*, 8(2). <https://doi.org/10.26418/lantang.v8i2.45981>
- Indriani, E. A., Santoso, B., & Irawati. (2019). Penyalahgunaan Rumah Dinas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. *Notarius*, 12(2).
- Karlina, N., Rusli, B., Muhtar, E. A., & Candradewini, C. (2021). SOSIALISASI PEMELIHARAAN PERSONAL HYGIENE DAN PROTEKSI DIRI DI LINGKUNGAN PERUMAHAN PADA ERA NEW NORMAL. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).

<https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.30658>

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Dasar-Dasar Rumah Sehat*. In *Dasar-Dasar Rumah Sehat*.
- Maurizka, I. G., & Rahmadhani, M. A. (2019). KEPEMILIKAN RUMAH DINAS OLEH PURNAWIRAWAN TNI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Law Review*, 19(1). <https://doi.org/10.19166/lr.v19i1.1469>
- Ningrum, Tias Puspita. (2018) *Kajian Perubahan Fungsi Rumah Tinggal menjadi Rumah Kos di Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto* [Bachelor thesis], Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Putro, J. D., & Purwaningsih, D. L. (2014). Pengaruh Fasilitas Sosial Terhadap Kenyamanan Interaksi Sosial Penghuni Perumahan Di Kelurahan Sungai Jawi Luar Pontianak. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 1(2), 43-53.
- Ramdhany, S. E. (2019). *Pemanfaatan Sarana Publik Pedestrian Di Kota Bandung Sebagai Latar Pemotretan Fotografi Still Life*. Sanny Eka Ramdhany: 146020044 (Doctoral dissertation, Fotografi & Film).
- Rumengan, M. R. C., Kindangen, J. I., & Takumansang, E. D. (2019). ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA KOTAMOBAGU. *Jurnal Spasial*, 6(2).
- Sutanto, D. H. (2021). Kebijakan dan Implementasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Pamekasan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.5352>
- Sutoyo, E., Pramono, S. D., . S., & Pawesti, K. W. (2019). PEMANFAATAN MCK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) WARGA RT 04/0 DESA SADENG. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.32832/abdidos.v3i3.330>
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan. <https://www.regulasip.id/book/4472/read#:~:text=PSU>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. file:///D:/SEMESTER%204/PERUMAHAN%20&%20PEMUKIMAN/PP_Nomor_12_Tahun_2021.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara. PP No. 31 Tahun 2005 (bpk.go.id).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4. (1992). *Perumahan dan Permukiman*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46596/uu-no-4-tahun-1992>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5. (1960). *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960 (bpk.go.id).
- Walikota Bandung. Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1384. (2016). *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Pertamanan Kota Bandung*. PERWALI Kota Bandung No. 1384 Tahun 2016 (bpk.go.id).